

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

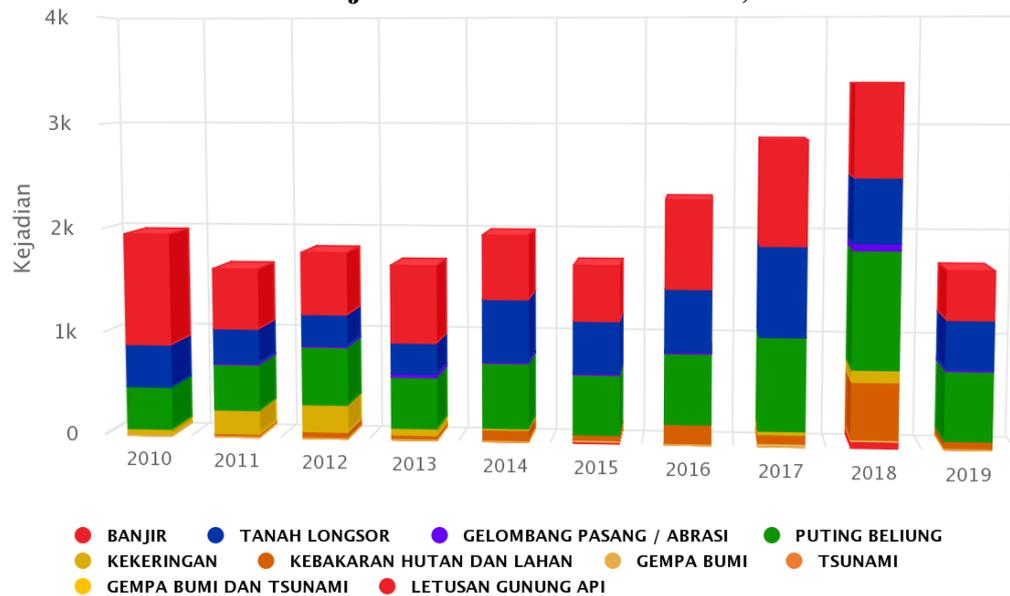
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilihat dari letak Geografisnya berada di antara Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, antara benua Asia dan benua Australia. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian, dimana Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional.

Secara Geologi wilayah Negara Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana, hal ini dikarenakan pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik (pegunungan lipatan yang mengelilingi Samudera Pasifik) dan Sirkum Mediteran (pegunungan lipatan yang dimulai dari pegunungan Atlas di Afrika Utara sampai Nikobar dan masuk Indonesia). Indonesia juga terletak di antara Cincin Api (*rings of fire*) di daerah antara lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia, yang terkenal sangat aktif. Pergerakan antar lempeng bumi menghasilkan banyak gempa bumi. Dengan kondisi geografis yang berada diantara cincin api, dan dikelilingi oleh lautan, maka Indonesia rentan dilanda bencana, baik gempa bumi, banjir, maupun bencana alam lainnya.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pada tahun 2015 tercatat 1.694 kejadian bencana di Indonesia, angka tersebut naik menjadi 2.306 kejadian bencana pada tahun 2016, pada tahun 2017 total bencana di Indonesia naik 24,1 % menjadi 2.862 kejadian bencana dengan

979 diantaranya adalah bencana banjir. Sedangkan untuk tahun 2018 data sementara yang tercatat di BNPN sebesar 1.677 kejadian bencana per 25 Mei 2019. Hal tersebut sesuai dengan gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Jumlah Kejadian Bencana di Indonesia, 2010-2019



www.bnpb.go.id

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

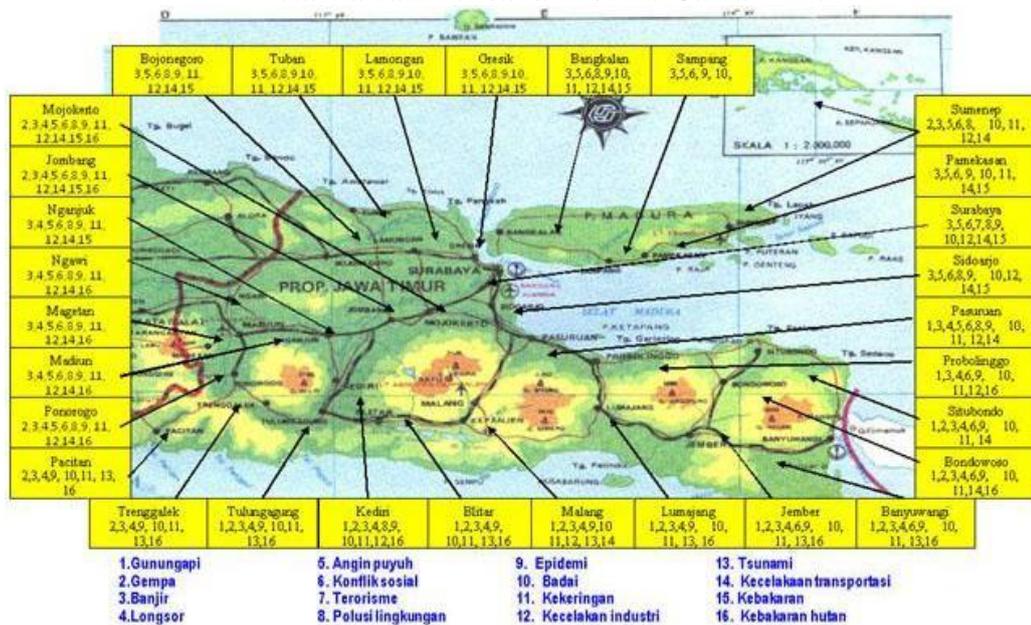
Secara global tren bencana alam di Indonesia tiap tahunnya semakin naik, pada kuartel pertama tahun 2019 Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 1.677 kejadian bencana terjadi di Indonesia.

Berdasarkan kutipan diatas mayoritas bencana yang terjadi di Indonesia dikarenakan oleh bencana hidrometeorologi, atau bencana yang dipengaruhi oleh aspek cuaca, seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Hal ini disebabkan oleh perubahan lingkungan dan faktor regional, berupa perubahan iklim secara global. Dampak dari bencana tersebut berpengaruh signifikan terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia. Potensi gangguan terhadap kehidupan sosial ekonomi telah dialami bagi penduduk yang tinggal di daerah rawan

bencana. Risiko bencana alam membawa pengaruh negatif terhadap pembangunan Nasional.

Secara geografis Jawa Timur dianggap memiliki potensi terjadinya bencana seperti banjir, tsunami, puting beliung, gempa, tanah longsor dan sebagainya. Hampir seluruh daerah di Jawa Timur merupakan daerah rawan bencana. Provinsi ini terancam tsunami dari Samudra Hindia, terancam letusan dari tujuh gunung berapi aktif, serta banjir tahunan dari dua sungai besar, yakni Bengawan Solo dan Brantas. Hal tersebut dapat digambarkan melalui peta rawan bencana Provinsi Jawa Timur pada Gambar 1. dibawah ini:

Gambar 1.2
Peta Rawan Bencana Provinsi Jawa Timur



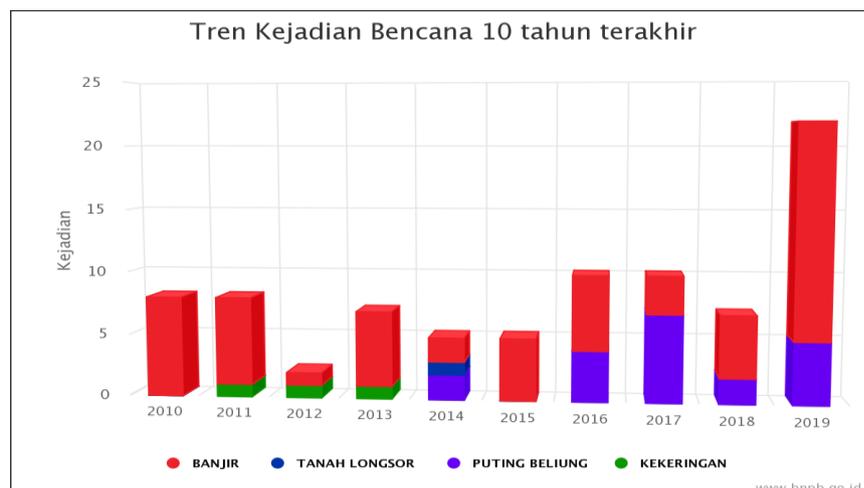
Sumber: BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Provinsi Jawa Timur, 2019

Gambar 1.2 diatas menunjukkan bahwa secara geografis Jawa Timur dianggap memiliki potensi terjadi bencana seperti banjir, tsunami, puting beliung, gempa, tanah longsor dan sebagainya. Hampir seluruh daerah di Jawa

Timur merupakan daerah rawan bencana. Provinsi ini terancam tsunami dari Samudra Hindia, terancam letusan dari tujuh gunung berapi aktif, serta banjir tahunan dari dua sungai besar, yakni Bengawan Solo dan Brantas. Daerah yang dilalui Sungai Bengawan Solo, yakni Kabupaten Ngawi, Tuban, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Selain itu, daerah yang dilalui Sungai Brantas meliputi Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, dan Surabaya. Sedangkan daerah di wilayah selatan Jawa Timur, yakni Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, dan Madiun sangat potensial mengalami bencana gempa tektonik hingga tsunami.

Dari Gambar 1.2 juga dapat diketahui pula bahwa Kabupaten Gresik sebagai salah satu bagian dari wilayah Jawa Timur dianggap memiliki potensi bencana yang kompleks, potensi bencana yang dimiliki kabupaten Gresik diantaranya banjir, angin puyuh, konflik sosial, polusi lingkungan, epidemi, badai, kekeringan, kecelakaan, industri, kecelakaan transportasi, dan kebakaran.

Gambar 1.3
Tren Kejadian Bencana Kabupaten Gresik



Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

Berdasarkan gambar diatas, kejadian bencana di Kabupaten Gresik didominasi oleh bencana Banjir. Bencana banjir kerap merendam pemukiman warga di Kabupaten Gresik diakibatkan oleh luapan air dari kali Lamong dan luapan air Bengawan Solo, khususnya yang berada di daerah aliran sungai Kali Lamong yakni kecamatan Balong Panggang, Benjeng, Cerme, dan Menganti serta kecamatan Dukun dan Bungah yang merupakan daerah aliran sungai Bengawan Solo. Berikut persebaran bencana banjir di Kabupaten Gresik:

Tabel 1.1
Persebaran Bencana Banjir di Kabupaten Gresik Tahun 2014-2017

Tahun	Kecamatan	Jenis Bencana
2014	Tambak	Banjir Luapan Sungai Kali Lamong
	Sangkapura	
	Balong Panggang	
	Benjeng	
	Menganti	
	Cerme	
2015	Benjeng	Banjir Luapan Sungai Kali Lamong
	Cerme	
	Menganti	
2016	Balong Panggang	Banjir Luapan Sungai Kali Lamong
	Benjeng	
	Cerme	
	Menganti	
	Kedamean	
	Dukun	Banjir Luapan Sungai Bengawan Solo
	Bungah	
	Sangkapura	Banjir Dikepulauan Pulau Bawean
	Tambak	
	Driyorejo	Banjir Kiriman dari Surabaya
	Wringinanom	
	Manyar	Banjir ROB
2017	Balong Panggang	Banjir Luapan Sungai Kali Lamong
	Benjeng	
	Cerme	
	Menganti	

	Bungah	Banjir Luapan Sungai Bengawan Solo
	Dukun	
	Wringinanom	Banjir Kiriman Dari Surabaya
	Driyorejo	

Sumber : dokumen BPBD Kabupaten Gresik (dikutip dari Amalia & Sari, 2018)

Sedangkan untuk kejadian bencana banjir tiap tahunnya, dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Bencana Banjir di Kabupaten Gresik Tahun 2010-2019

Tahun	Jumlah Kejadian	Korban (Jiwa)		Rumah Terendam (Unit)
		Meninggal dan Hilang	Terdampak dan Mengungsi	
2010	8	0	0	1.690
2011	7	0	2.000	22.290
2012	1	0	0	0
2013	6	4	350	1.669
2014	2	0	0	2.074
2015	5	3	12.955	4.383
2016	6	0	185	6.287
2017	3	0	25	4.495
2018	5	0	0	376
2019*	17	2	820	7.484

Keterangan : * data sementara per-Agustus 2019

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diolah oleh penulis, 2019

Dari tabel 1.2 diatas diketahui bahwa tiap tahunnya terjadi bencana banjir di Kabupaten Gresik dengan kerugian dengan total korban terdampak dan pemukiman yang cukup banyak. Sebagai contoh pada tahun 2019 dari bulan Januari sampai bulan Agustus terjadi 17 kali bencana banjir dengan memakan 2 korban jiwa. Perlu diketahui sebagian masyarakat Gresik yang tinggal di pinggiran daerah aliran sungai Kali Lamong dan Bengawan Solo merupakan masyarakat dengan pekerjaan bertani atau bertambak sehingga dampak akibat

banjir tersebut membuat warga mengalami kerugian, khususnya terhadap aspek pertanian dan perikanan yang mengalami rusaknya lahan dan tanaman atau ikan milik petani. Kerugian akibat banjir juga berdampak di pemukiman yakni rusaknya perabotan rumahnya.

Dikutip dari rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, Kabupaten Gresik memiliki penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana, dimana pada umumnya merupakan kelompok penduduk yang rentan secara sosial dan ekonomi, sehingga keterbatasan kemampuan mengatasi dan menanggulangi bencana alam cukup rendah. Maka perlu adanya bantuan penanganan bencana dari pemerintah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah mengamanatkan Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk menanggulangi masalah banjir di Kabupaten Gresik, maka dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 tahun 2012 yang tugas utamanya adalah membantu Pemerintah Daerah dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Gresik. Berkaitan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan resiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (*stakeholders*).

Salah satu tugas dari Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Gresik adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 tahun 2012 menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang

mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata.

Muncul beberapa Permasalahan yang berkaitan dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gresik yang dirasakan warga, diantaranya adalah lambatnya respon dari Pemerintah, sebagaimana yang diutarakan Agus Junaidi kepala KNPI serta ketua PC GP Ansor Kabupaten Gresik.

“...Pemerintah daerah sampai dengan pemerintah provinsi dan pusat harus memprioritaskan musibah ini segera diakhiri. Ia mengaku menyesalkan penanganan banjir Kali Lamong yang sangat lamban. Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat. Baik itu melalui normalisasi atau membuat waduk berskala besar untuk menampung air...”

(sumber : <http://jatim.tribunnews.com/2019/05/03/kali-lamong-gresik-tiap-tahun-banjir-gp-ansor-siap-kawal-penanganannya-sampai-pemerintah-pusat>. Diakses tanggal 11 mei 2019)

Mengingat bahwa lambatnya penanganan Pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir di kabupaten Gresik ini, sampai memunculkan petisi sebagai bentuk protes warga. Petisi ini dibuat dengan judul “Kepada pemerintahan kabupaten Gresik segera menangani banjir tahunan di Benjeng, BP, Cerme,” dibuat Nasrin Hasan melalui <https://www.change.org/> Sejak petisi ini dibuat pada Jumat 3 april 2019 hingga minggu 12 Mei 1019 sudah ada 792 orang yang menandatangani petisi ini. Petisi tersebut berisikan :

“...Mohon kepada pemangku kebijakan di kabupaten Gresik segera **mencari solusi penanganan kali lamong yang tiap tahunnya meluap dan mengakibatkan banjir**. Rakyat sekitar bukan butuh mie instan atau pun nasi bungkus tapi membutuhkan solusi dari pemangkuh kebijakan untuk mengatasi banjir tersebut. Jangan jadikan kunjungan tiap tahun pada saat banjir, hapus air mata rakyat sekitar berikan kebagian dan ketenangan rakyat sekitar...”

(sumber : <http://chng.it/SJ4JqTJ6DC> diakses tanggal 3 april 2019)

Pemerintah Kabupaten Gresik sebenarnya telah mempunyai program dalam penanggulangan bencana banjir. Namun belum terkoordinasinya secara baik penanggulangannya baik antara lembaga-lembaga dalam Pemerintahan Daerah, SKPD maupun berbagai elemen masyarakat khususnya sektor terkait penanganan banjir. Sebagaimana yang diutarakan salah satu anggota DPRD Gresik, Nur Saidah dibawah ini:

“...Opsi solusi mengatasi banjir tersebut sudah berkali-kali wacanakan dari Satu era Pemerintahan ke Pemerintahan yang lain namun hingga Ia menjabat sebagai wakil rakyat pun tak kunjung terselesaikan. Sekarang ini segala cara sudah kita (DPRD Gresik red-) usulkan ke Eksekutif. Tinggal DPUPR yang harus jemput bola...”

(sumber : <https://panjinasional.net/2019/05/03/upaya-penyelesaian-banjir-kali-lamong-secepatnya-dprd-gresik-bahas-solusi-dengan-bbwsbs/> diakses tanggal 11 mei 2019)

Penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan wilayah yang berisiko mengakibatkan timbulnya bencana, terjadinya bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi (Pasca Bencana). Tujuan dari penanggulangan bencana adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana; menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada; menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; menghargai budaya lokal; membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta; mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun tahapan-tahapan atau fase-fase dalam bantuan bencana dikenal dengan siklus penanganan bencana (*disaster management cycle*). Siklus manajemen bencana menggambarkan proses pengelolaan bencana yang dimulai

dari sebelum terjadinya bencana berupa kegiatan pencegahan, mitigasi (pelunakan/pengurangan dampak) dan kesiapsiagaan. Pada saat terjadinya bencana berupa kegiatan tanggap darurat dan selanjutnya pada saat setelah terjadinya bencana berupa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dari permasalahan penanggulangan banjir di atas penulis ingin membahas mengenai penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Gresik pada tahap prabencana, dengan alasan tahap ini merupakan tahapan terpenting untuk mencegah dan mengurangi resiko bencana banjir. Adapun judul yang penulis ambil adalah “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Gresik”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Gresik ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang diinginkan oleh penulis di atas, maka manfaat dan diharapkan dapat berguna :

- a. Bagi Penulis

Untuk mengetahui Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Gresik.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Untuk menambah khasanah bacaan ilmiah di perpustakaan dalam meningkatkan ilmu pengetahuan

c. Bagi Instansi

Sebagai sumbangsih saran dan masukan terhadap peran dari Badan Penanggulangan Bencana daerah kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.